

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL: RELEVANSI, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI TERHADAP PEMERATAAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN

Nur Anisah<sup>1</sup>

Jurusan manajemen pendidikan islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

E-mail: \* [nuranisah327@gmail.com](mailto:nuranisah327@gmail.com).

### ABSTRAK

Kebijakan pendidikan nasional dirancang untuk meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, namun implementasinya sering menghadapi kendala struktural dan operasional di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi kebijakan pendidikan nasional, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta menilai implikasinya terhadap pemerataan mutu layanan pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi kebijakan. Data penelitian meliputi dokumen regulasi pendidikan nasional, laporan pelaksanaan program, data statistik pendidikan terbaru, serta pandangan pemangku kepentingan yang dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi terbatas untuk memahami dinamika implementasi di lapangan. Hasil menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional telah sesuai dengan kebutuhan strategis, terutama dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan akses pendidikan. Namun, tantangan signifikan masih muncul dalam bentuk ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kapasitas pelaksana, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Kondisi ini berdampak pada ketimpangan mutu layanan pendidikan antar wilayah, terutama pada daerah dengan sumber daya terbatas. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pendidikan nasional belum optimal meskipun arah kebijakannya sudah tepat. Implikasi penelitian menegaskan perlunya penguatan tata kelola implementasi, peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan, serta penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah.

### Kata kunci

**Analisis Kebijakan, Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Mutu Pendidikan; Pemerataan.**

### ABSTRACT

*National education policies are formulated to enhance the quality and equity of educational services; however, their implementation often encounters structural and operational challenges at the regional level. This study aims to analyze the relevance of national education policies, identify the major challenges faced during their implementation, and examine their implications for the equity of educational quality in Indonesia. A descriptive qualitative research method was employed using a policy content analysis approach. The data consisted of national education regulatory documents, program implementation reports, updated educational statistics, and stakeholders' perspectives collected through semi-structured interviews. Data were gathered through documentation review, interviews, and limited observation to capture the dynamics occurring during policy execution. The findings indicate that the strategic direction of national education policies aligns with current system needs, particularly in improving learning quality and educational access. Nevertheless, significant challenges persist, including gaps between policy design and institutional capacity, budget limitations, and weak inter-agency coordination. These constraints contribute to disparities in educational quality across regions, especially those with limited resources. The study concludes that although the policies are well-aligned with national priorities, their effectiveness at the implementation level remains suboptimal. The implications emphasize the need to strengthen governance mechanisms, enhance*

**Keywords**

*the capacity of policy implementers, and develop more adaptive regulations responsive to regional contexts.*

***Education Policy, Educational Quality, Equity, Implementation, Policy Analysis***

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran sentral dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di Indonesia, berbagai kebijakan pendidikan nasional telah dirumuskan untuk memperluas akses, meningkatkan mutu pembelajaran, serta memperkuat pemerataan layanan pendidikan. Namun, kondisi lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan hasil implementasinya. Ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah, terutama antara daerah maju dan daerah dengan keterbatasan sumber daya, menjadi indikator penting bahwa proses implementasi kebijakan belum berjalan optimal (Arifin dan Susanto, 2020).

Dalam konteks tersebut, analisis terhadap implementasi kebijakan pendidikan menjadi urgensi akademik sekaligus kebutuhan praktis untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dirumuskan pemerintah telah relevan dengan kebutuhan sekolah, guru, dan peserta didik. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor seperti kapasitas institusi, ketidaksesuaian regulasi, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga sering menjadi penghambat utama dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, kajian yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami akar permasalahan serta dampaknya terhadap pemerataan layanan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana relevansi kebijakan pendidikan nasional terhadap kebutuhan sistem pendidikan saat ini; (2) tantangan apa saja yang muncul dalam proses implementasi kebijakan di berbagai wilayah; dan (3) bagaimana implikasi implementasi kebijakan tersebut terhadap pemerataan mutu layanan pendidikan. Rumusan masalah ini disusun untuk mengarahkan penelitian secara fokus dan terukur (Budiarto, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan nasional secara komprehensif, mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola kebijakan pendidikan sehingga lebih adaptif terhadap karakteristik daerah (Hapsari dan Widodo, 2023). Dengan pendekatan analisis kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan pendidikan nasional. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang untuk memahami proses, dinamika, serta konteks sosial yang melingkupi pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah. Analisis dilakukan melalui *policy content analysis* yang bertujuan menelaah kesesuaian antara rumusan kebijakan dengan kebutuhan lapangan serta mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam praktik. Unit analisis penelitian mencakup dokumen regulasi pendidikan seperti undang-undang, peraturan menteri, petunjuk teknis, dan laporan pelaksanaan program pendidikan (Karim dan Suryani, 2021). Selain itu, penelitian juga melibatkan perspektif

pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, pengawas, serta pejabat dinas pendidikan untuk menangkap pemahaman, interpretasi, dan tantangan yang mereka hadapi selama proses implementasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman, posisi, serta keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan observasi pendukung. Studi dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi isi kebijakan, struktur regulasi, serta indikator implementasi yang tertuang dalam dokumen resmi. Wawancara dilakukan dengan panduan yang fleksibel agar informan dapat memberikan penjelasan mendalam mengenai pengalaman dan hambatan implementasi kebijakan. Sementara itu, observasi pendukung dilakukan secara terbatas untuk memahami konteks sosial-kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, termasuk pola koordinasi, distribusi sumber daya, dan respons sekolah terhadap perubahan regulasi (Maulida dan wahyudi). Data yang terkumpul dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan-verifikasi menggunakan model *Miles* dan *Huberman*. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk meningkatkan validitas temuan sehingga hasil penelitian lebih akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Relevansi Kebijakan Pendidikan Nasional**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional memiliki tingkat relevansi yang kuat terhadap kebutuhan fundamental sistem pendidikan Indonesia, meskipun penerjemahan kebijakan ke ranah implementatif belum sepenuhnya konsisten. Relevansi tersebut terlihat dari upaya pemerintah dalam menyelaraskan arah kebijakan dengan dinamika global, tuntutan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Analisis data dokumen kebijakan menunjukkan bahwa penyusunan regulasi pendidikan dilakukan melalui pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam (Nugroho dan Setiawan, 2020). Dalam wawancara, para pemangku kepentingan menyatakan bahwa secara konseptual kebijakan telah dirancang menjawab masalah inti pendidikan nasional: rendahnya mutu pembelajaran, ketimpangan layanan, dan kebutuhan kompetensi masa depan.

##### **a. Penguatan Mutu Pembelajaran sebagai Arah Filosofis Kebijakan**

Kebijakan nasional menegaskan bahwa kualitas pembelajaran adalah elemen utama untuk meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini tampak jelas dalam kebijakan kurikulum yang terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Kurikulum berbasis kompetensi, penilaian autentik, penguatan literasi dan numerasi, serta integrasi *higher-order thinking skills* menjadi bukti bahwa kebijakan diarahkan pada pembelajaran yang lebih bermakna. Informan menyebutkan bahwa regulasi mengenai peningkatan kapasitas guru, seperti program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan, menunjukkan bahwa kebijakan telah menyasar akar permasalahan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, secara substansi, kebijakan sudah sangat relevan dengan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

##### **b. Pemerataan Akses Pendidikan sebagai Kerangka Pemerataan Nasional**

Relevansi kebijakan juga terlihat dari komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan akses pendidikan. Kebijakan afirmatif seperti distribusi guru ke daerah 3T, pembangunan satuan pendidikan baru, dan penyaluran bantuan pendidikan merupakan upaya strategis untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah. Data dokumen menunjukkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi peta kebutuhan sekolah dan kesenjangan kualitas layanan secara komprehensif. Hasil wawancara dengan dinas pendidikan memperkuat temuan bahwa kebijakan pemerintah pada dasarnya telah didesain agar setiap peserta didik memperoleh hak pembelajaran yang sama, terlepas dari lokasi geografis. Secara konseptual, langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan masih relevan dalam menjawab masalah ketidakmerataan pendidikan yang telah berlangsung lama.

#### **c. Relevansi Digitalisasi Pendidikan terhadap Tuntutan Era Teknologi**

Digitalisasi menjadi salah satu fokus utama yang memperlihatkan tingginya relevansi kebijakan pendidikan terhadap perkembangan zaman. Berbagai kebijakan mendorong pemanfaatan platform digital, penguatan manajemen sekolah berbasis informasi, serta integrasi literasi digital dalam kurikulum. Regulasi terbaru menunjukkan upaya pemerintah memfasilitasi adaptasi sekolah terhadap tantangan era digital. Informan menilai bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan fundamental bagi dunia pendidikan, terutama dalam mempersiapkan siswa menghadapi ekosistem kerja digital. Walaupun implementasi masih belum merata karena perbedaan infrastruktur, secara substansi kebijakan ini dianggap tepat dan relevan dengan tuntutan global.

#### **d. Penyesuaian Kebijakan dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Global**

Kebijakan pendidikan nasional juga relevan karena mendukung agenda pembangunan nasional seperti peningkatan kualitas SDM dan Indonesia Emas 2045. Selain itu, kebijakan juga berorientasi pada standar internasional seperti SDGs, khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif. Dokumen kebijakan mencerminkan keselarasan antara kebutuhan nasional, tantangan global, dan kesiapan sumber daya manusia. Relevansi ini juga diakui oleh pemangku kepentingan yang melihat bahwa arah kebijakan pendidikan terus bergerak menuju sistem yang lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan.

#### **e. Identifikasi Tantangan sebagai Indikator Relevansi Kebijakan**

Salah satu indikator bahwa kebijakan relevan adalah adanya upaya pemerintah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Regulasi yang menekankan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan menunjukkan bahwa pemerintah menyadari kompleksitas implementasi kebijakan. Hal ini memperkuat bahwa kebijakan disusun bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan normatif, tetapi juga mempertimbangkan dinamika empiris yang berkembang di satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa relevansi kebijakan pendidikan nasional berada pada tingkat yang tinggi. Arah kebijakan telah sesuai dengan masalah utama pendidikan Indonesia dan konsisten dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Namun, relevansi yang baik tersebut belum sepenuhnya berdampak langsung pada pemerataan kualitas pendidikan karena berbagai kendala implementatif yang akan dibahas pada bagian selanjutnya (Putri, 2022).

### **3.2 Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan di Lapangan**

Meskipun kebijakan pendidikan nasional memiliki tingkat relevansi yang kuat terhadap kebutuhan sistem pendidikan, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di tingkat daerah maupun satuan pendidikan. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek struktural, manajerial, sosial, hingga budaya institusi. Hasil triangulasi

dokumen, wawancara, dan observasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pelaksana, disparitas sumber daya, serta ketidaksinkronan kebijakan antara level pusat dan daerah. Berikut uraian tantangan utama yang ditemukan (Rachmawati dan Yuniarti, 2023).

**a. Keterbatasan Kapasitas Institusional dalam Manajemen Implementasi**

Banyak satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah belum memiliki kapasitas institusional yang memadai untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat operasional. Hal ini ditandai oleh kurangnya tenaga administrasi terlatih, lemahnya perencanaan berbasis data, serta minimnya manajemen perubahan (change management). Wawancara dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa sebagian sekolah belum memiliki kemampuan memadai dalam melakukan adaptasi terhadap regulasi baru, terutama yang memerlukan sistem manajemen berbasis teknologi. Ketimpangan kapasitas ini berpengaruh pada kualitas implementasi kebijakan dan kecepatan adopsi program pemerintah.

**b. Keterbatasan Anggaran dan Ketidakseimbangan Distribusi Sumber Daya**

Tantangan lain yang menonjol adalah keterbatasan anggaran, khususnya di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Kebijakan pendidikan umumnya menuntut penyesuaian fasilitas, pelatihan, dan perbaikan sarana pembelajaran, namun tidak semua daerah memiliki anggaran memadai untuk mendukung kebutuhan tersebut. Observasi dan dokumen menunjukkan bahwa alokasi anggaran di beberapa daerah lebih banyak terserap pada kebutuhan administratif, sehingga program penguatan kualitas pembelajaran tidak berjalan optimal. Ketidakseimbangan distribusi sumber daya seperti guru, infrastruktur digital, dan fasilitas pembelajaran menyebabkan implementasi kebijakan berlangsung tidak merata.

**c. Minimnya Koordinasi Lintas Lembaga dan Sinkronisasi Kebijakan**

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan sering kali tidak berjalan harmonis. Dokumen kebijakan tingkat pusat terkadang tidak selaras dengan petunjuk teknis di tingkat daerah, sehingga menimbulkan interpretasi berbeda. Dalam wawancara, sejumlah pengawas sekolah menyebutkan bahwa ketidaksinkronan informasi menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program dan kebingungan pelaksana. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif antar lembaga memperlambat proses penyaluran anggaran, distribusi guru, dan pelaksanaan program pelatihan.

**d. Rendahnya Literasi Kebijakan di Tingkat Pelaksana**

Salah satu hambatan besar yang muncul adalah rendahnya pemahaman pelaksana sekolah terhadap isi dan tujuan kebijakan. Banyak guru dan kepala sekolah belum membaca secara utuh regulasi atau petunjuk teknis yang menjadi dasar implementasi. Akibatnya, interpretasi kebijakan sering kali menyimpang dari tujuan awal. Informan menyebutkan bahwa perubahan regulasi yang terlalu cepat membuat pelaksana kewalahan mengikuti perkembangan. Minimnya sosialisasi intensif dan pelatihan khusus juga berkontribusi terhadap rendahnya literasi kebijakan.

**e. Tantangan Sosial dan Budaya Institusional**

Selain hambatan teknis, faktor sosial dan budaya sekolah turut memengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa sekolah menunjukkan resistensi terhadap perubahan karena budaya institusi yang cenderung konservatif. Guru yang telah terbiasa dengan pola lama cenderung menolak pendekatan baru, terutama kebijakan yang menuntut inovasi pembelajaran. Pengaruh lingkungan sosial, seperti tingkat pendidikan masyarakat dan partisipasi orang tua, juga menentukan keberhasilan kebijakan.

**f. Kesenjangan Infrastruktur Digital dalam Proses Implementasi**

Digitalisasi yang menjadi salah satu fokus kebijakan nasional tidak berjalan merata akibat kesenjangan infrastruktur. Daerah 3T mengalami keterbatasan jaringan internet, listrik, dan perangkat teknologi. Hal ini membuat kebijakan yang berbasis digital sulit diterapkan. Wawancara dengan guru di daerah terpencil menunjukkan bahwa mereka harus menggunakan metode alternatif karena keterbatasan akses digital, sehingga tujuan kebijakan tidak sepenuhnya tercapai.

#### **g. Kurangnya Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data**

Implementasi kebijakan memerlukan sistem evaluasi yang konsisten, namun banyak daerah belum memiliki sistem monitoring berbasis data yang memadai. Data sekolah sering tidak diperbaharui, dan pelaporan belum terstandar. Pengawas sekolah menyatakan bahwa sebagian evaluasi kebijakan hanya bersifat administratif tanpa analisis mendalam. Akibatnya, pemerintah tidak dapat memetakan efektivitas implementasi secara akurat.

### **3.3 Dampak Implementasi terhadap Pemerataan Mutu Pendidikan**

Dampak implementasi kebijakan pendidikan nasional terhadap pemerataan mutu pendidikan menunjukkan hasil yang beragam, bergantung pada kondisi wilayah, kapasitas institusi, dan tingkat kesiapan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketimpangan nyata antara daerah yang memiliki sumber daya memadai dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan struktural. Analisis triangulasi data menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dirancang untuk meningkatkan mutu dan pemerataan, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh konteks lokal. Oleh karena itu, dampaknya perlu dilihat secara detail pada berbagai aspek berikut.

#### **a. Perbedaan Kecepatan Adopsi Kebijakan antar Wilayah**

Temuan menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas manajerial dan anggaran yang kuat lebih cepat mengadopsi dan menjalankan kebijakan secara efektif. Mereka mampu mengoptimalkan pelatihan guru, memperbaiki fasilitas pembelajaran, dan menerapkan kurikulum baru dengan baik. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan sumber daya mengalami keterlambatan signifikan, sehingga terjadi kesenjangan dalam penerapan kebijakan antara wilayah maju dan daerah 3T. Ketimpangan kecepatan adopsi ini memengaruhi kualitas layanan pendidikan dan peluang siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang setara.

#### **b. Ketimpangan Mutu Pembelajaran sebagai Konsekuensi Kapasitas Guru**

Implementasi kebijakan yang terkait peningkatan kompetensi guru memberikan hasil positif di daerah yang memiliki akses terhadap pelatihan dan pendampingan. Guru-guru di daerah tersebut menunjukkan peningkatan dalam penguasaan pedagogik, pengelolaan kelas, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Namun, hasil wawancara mengungkap bahwa banyak guru di daerah terpencil tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga kualitas pembelajaran tidak meningkat secara signifikan. Ketimpangan akses pelatihan menjadi faktor utama yang memperlebar kesenjangan mutu antar sekolah.

#### **c. Ketidakseimbangan Akses Infrastruktur Pendidikan**

Fasilitas pendidikan yang memadai menjadi faktor kunci dalam menunjang mutu pembelajaran. Namun, implementasi kebijakan penguatan sarana prasarana masih menghadapi ketimpangan geografis. Daerah dengan infrastruktur yang baik mampu menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, sementara sekolah di daerah 3T masih kekurangan ruang belajar layak, peralatan laboratorium, dan perangkat teknologi. Ketimpangan ini berdampak pada kualitas hasil belajar siswa, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan praktik atau teknologi digital.

#### **d. Dampak Digitalisasi yang Tidak Merata**

Kebijakan digitalisasi pendidikan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata. Sekolah-sekolah di perkotaan dapat mengintegrasikan platform digital, sistem evaluasi daring, dan pembelajaran berbasis internet secara efektif. Sementara itu, sekolah di daerah dengan keterbatasan jaringan dan perangkat mengalami kesulitan dalam menerapkan program digitalisasi, sehingga siswa mereka tertinggal dalam kemampuan literasi digital. Ketimpangan ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.

#### **e. Variasi Mutu Layanan karena Sistem Supervisi yang Tidak Konsisten**

Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi pendidikan tidak berjalan konsisten di semua daerah. Daerah dengan pengawas sekolah yang aktif mampu menjaga kualitas implementasi kebijakan, memonitor proses pembelajaran, dan memberikan umpan balik kepada sekolah. Namun, di daerah lain, supervisi berjalan formalitas sehingga kualitas pelaksanaan kebijakan tidak terpantau. Akibatnya, variasi mutu layanan antar sekolah semakin melebar karena tidak adanya intervensi yang sistematis (Nugroho, 2020).

### **3.4 Efektivitas Implementasi Kebijakan di Tingkat Satuan Pendidikan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan sangat ditentukan oleh tiga faktor utama: kapasitas institusi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan lingkungan eksternal. Meskipun kebijakan nasional telah dirumuskan secara komprehensif, implementasinya di sekolah tidak selalu berjalan secara optimal. Temuan lapangan memperlihatkan adanya variasi signifikan antar satuan pendidikan dalam memahami, menerjemahkan, dan melaksanakan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kurikulum, digitalisasi, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

#### **a. Kapasitas Manajerial dan Kelembagaan Sekolah**

Kapasitas sekolah dalam mengelola kebijakan sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Sekolah dengan manajemen yang kuat—ditandai oleh kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, struktur organisasi yang jelas, serta budaya kerja kolaboratif—lebih mampu mengadopsi kebijakan nasional secara konsisten. Sebaliknya, sekolah dengan kapasitas organisasi yang lemah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami teknis kebijakan, menyiapkan dokumen administrasi, dan mengkoordinasikan program. Data penelitian menunjukkan bahwa banyak sekolah masih terjebak pada budaya birokratis dan administratif, sehingga implementasi kebijakan lebih menjadi kegiatan pemenuhan dokumen daripada perbaikan kualitas pembelajaran yang substansial.

#### **b. Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan**

Guru merupakan aktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan wawancara mendalam mengungkapkan bahwa rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman kurikulum baru, dan minimnya pelatihan pedagogis menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan. Guru di daerah 3T menghadapi kendala tambahan berupa kurangnya akses teknologi dan peluang pengembangan profesional. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai platform pelatihan, partisipasi dan keterjangkauannya masih belum merata. Faktor motivasi kerja juga memengaruhi efektivitas implementasi; guru yang memiliki komitmen profesional tinggi lebih cepat menyesuaikan praktik mengajar dengan tuntutan kebijakan.

#### **c. Kesiapan Infrastruktur dan Dukungan Lingkungan**

Efektivitas implementasi kebijakan erat berkaitan dengan kesiapan sarana prasarana sekolah. Sekolah dengan akses internet stabil, laboratorium memadai, serta ketersediaan perangkat teknologi menunjukkan adaptasi lebih baik terhadap kebijakan digitalisasi dan transformasi pembelajaran. Sebaliknya, sekolah dengan fasilitas terbatas mengalami hambatan serius dalam menjalankan program berbasis teknologi. Selain itu, dukungan lingkungan sekitar—seperti keterlibatan orang tua, komitmen pemerintah daerah, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat—juga berpengaruh signifikan. Sekolah yang berada di lingkungan yang partisipatif lebih cepat menginternalisasi kebijakan karena terbantu oleh dukungan sosial dan material dari komunitas.

#### **d. Sinkronisasi Kebijakan Pusat–Daerah–Sekolah**

Penelitian menemukan bahwa efektivitas implementasi sering terkendala oleh kurangnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan interpretasi, tumpang tindih regulasi, hingga perubahan kebijakan yang mendadak menyebabkan sekolah kesulitan menyusun rencana kerja yang stabil. Situasi ini diperparah oleh keterlambatan distribusi anggaran serta perbedaan prioritas pembangunan pendidikan di tingkat daerah. Akibatnya, sekolah kerap terjebak dalam beban administrasi dan program jangka pendek, sehingga fokus pembelajaran terganggu.

#### **e. Implikasi terhadap Kualitas Pendidikan di Lapangan**

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan aktor dan ekosistem pendidikan di tingkat akar rumput. Sekolah yang memiliki kapasitas kuat mampu menerjemahkan kebijakan menjadi perubahan nyata dalam proses pembelajaran, sementara sekolah yang lemah justru mengalami fragmentasi implementasi. Temuan ini menegaskan bahwa untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan nasional, penguatan kapasitas satuan pendidikan harus dijadikan prioritas intervensi pemerintah.

### **3.5 Tantangan dan Peluang Penguatan Kebijakan Pendidikan**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis, namun di sisi lain juga membuka peluang strategis untuk penguatan tata kelola pendidikan nasional. Tantangan tersebut tidak hanya muncul pada level implementasi, tetapi juga pada tahap perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, hingga kesiapan pemangku kepentingan dalam mengantisipasi perubahan sistem pendidikan global. Pembahasan berikut merinci beberapa aspek kunci yang menunjukkan kompleksitas dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia.

#### **a. Tantangan Struktural dan Kelembagaan**

Tantangan utama yang dihadapi kebijakan pendidikan terletak pada struktur kelembagaan yang masih berlapis dan cenderung birokratis (Rachmawati dan Yuniarti, 2023). Banyak kebijakan yang tidak diikuti dengan pedoman operasional yang terperinci, sehingga menimbulkan interpretasi ganda di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Kondisi ini diperparah oleh variasi kapasitas manajemen antar daerah, terutama antara wilayah maju dan wilayah 3T. Di beberapa daerah, sekolah masih bergantung pada instruksi teknis yang terlambat atau tidak sinkron dengan dinamika lapangan akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan kelembagaan ini menciptakan beban administratif tambahan, menghambat inovasi, dan memperlambat adaptasi kebijakan baru di sekolah.

#### **b. Hambatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme**



SDM pendidikan, terutama guru dan tenaga kependidikan, masih menghadapi hambatan yang signifikan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, baik dari segi pedagogik maupun teknologi. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pelatihan peningkatan kompetensi sering kali tidak berkelanjutan dan kurang kontekstual dengan kebutuhan sekolah. Selain itu, adanya disparitas kualitas guru antar daerah menjadikan implementasi kebijakan tidak merata. Guru di wilayah urban cenderung lebih siap mengadopsi kebijakan baru karena akses terhadap teknologi dan pelatihan lebih baik, sedangkan guru di wilayah terpencil menghadapi keterbatasan fasilitas yang menghambat profesionalisme mereka. Hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas pembelajaran yang berdampak langsung pada pencapaian peserta didik.

#### **c. Keterbatasan Infrastruktur dan Kesetaraan Akses**

Masalah infrastruktur masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penguatan kebijakan pendidikan di Indonesia. Ketimpangan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan menyebabkan implementasi program digitalisasi dan modernisasi sekolah berjalan tidak merata. Beberapa sekolah masih kekurangan ruang kelas layak, laboratorium, dan akses internet, sementara kebijakan nasional mengharuskan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan manajemen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanpa penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, kebijakan pendidikan berpotensi menjadi tidak efektif dan bahkan menciptakan kesenjangan baru. Data penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar sekolah yang kurang infrastruktur juga memiliki tingkat partisipasi pelatihan guru yang rendah, sehingga tantangan akses dan kompetensi berjalan beriringan.

#### **d. Peluang Transformasi melalui Kolaborasi dan Inovasi**

Meskipun menghadapi berbagai kendala, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan pendidikan. Pertama, perkembangan teknologi informasi membuka ruang bagi inovasi pembelajaran berbasis digital, yang dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pengajaran. Kedua, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dinilai mampu mempercepat modernisasi sekolah dan meningkatkan kapasitas guru. Ketiga, peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya pendidikan memberikan momentum positif bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis data. Dengan memanfaatkan peluang ini, Indonesia memiliki potensi untuk mempercepat transformasi pendidikan menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan nasional Indonesia telah disusun dengan arah yang relatif jelas, komprehensif, dan relevan terhadap tantangan pendidikan kontemporer, khususnya terkait peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses, dan digitalisasi pendidikan. Namun, efektivitas kebijakan di lapangan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan sekolah, kompetensi guru, kesiapan infrastruktur, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi masih terjadi secara signifikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya dan akses teknologi, sehingga kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diinternalisasi secara merata di seluruh satuan pendidikan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan memerlukan pendekatan yang lebih holistik melalui penguatan tata kelola, peningkatan

kompetensi SDM pendidikan, serta pengembangan kebijakan berbasis bukti yang mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Peluang transformasi pendidikan dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi multi-stakeholder, dan inovasi sistem pembelajaran yang adaptif. Dengan mengatasi kendala struktural dan memperkuat integrasi antara pemangku kepentingan, kebijakan pendidikan nasional berpotensi menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Susanto, H. (2020). Policy implementation in Indonesian education: Challenges and opportunities in the digital era. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(2), 101–115.
- Budiarto, R., & Mahendra, T. (2021). Teachers' readiness and competence in implementing curriculum reform. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 12(3), 210–225.
- Dwiyan, R., & Fathurrahman, A. (2021). Curriculum transformation and school readiness in post-pandemic education. *Jurnal Reformasi Pendidikan*, 5(2), 88–102.
- Farida, S., & Rahman, A. (2022). Equity and access issues in Indonesian remote-area schools: A policy review. *Jurnal Pendidikan dan Pemerataan*, 7(1), 45–60.
- Hapsari, N. D., & Widodo, S. (2023). Digital transformation in Indonesian schools: Policy direction and implementation challenges. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 18(2), 77–93.
- Karim, A., & Suryani, L. (2021). Governance and institutional capacity in education policy execution. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(4), 350–364.
- Lestari, R., & Pramudia, D. (2020). Analysis of regional disparities in education development. *Jurnal Analisis Pendidikan*, 8(1), 55–70.
- Maulida, I., & Wahyudi, R. (2024). Evidence-based policy in Indonesian education: A systematic analysis of policy outcomes. *Jurnal Riset Kebijakan Publik*, 5(1), 12–29.
- Nugroho, T., & Setiawan, D. (2020). Infrastructure disparity and its impact on policy effectiveness in rural schools. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 6(2), 180–194.
- Prasetya, N., & Mulyono, S. (2022). School leadership and policy adaptation during educational reform. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 4(3), 140–155.
- Putri, A. K., & Lestari, M. (2022). Teacher professional development in the context of curriculum innovation. *Jurnal Pengembangan Profesi Guru*, 4(3), 155–170.
- Rachmawati, E., & Yuniarti, D. (2023). Stakeholder collaboration in strengthening school-based management policies. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 11(1), 55–70.
- Siregar, J., & Prasetyo, B. (2024). Evaluating policy alignment between national and regional education authorities. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 8(2), 98–115.
- Sundari, F., & Wijaya, H. (2023). Digital literacy readiness among teachers for implementing national education policy. *Jurnal Literasi Digital Pendidikan*, 3(2), 34–48.
- Susilawati, M., & Ihsan, R. (2021). Assessment policy reform and its impact on learning evaluation. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(2), 167–182.
- Wijaya, K., & Mulyani, P. (2021). Impact of digital learning policy during post-pandemic transition. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 16(3), 233–248.
- Yusuf, H., & Kurniawati, S. (2022). Challenges in achieving inclusive education through national policy strategies. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 10(2), 120–137.